

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi fiskal di Indonesia pada tahun 2025 ditandai dengan kebijakan konsolidasi anggaran yang sangat drastis melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk memperkuat keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global (Inpres Nomor 1 Tahun, 2025). Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemerintah dari penganggaran rutin menuju penganggaran yang bersifat terbatas demi menjaga ketahanan ekonomi di tengah gejolak global. Target akumulasi penghematan nasional yang diproyeksikan mencapai Rp.306,69 triliun, mencakup pemangkasan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp.256,1 triliun dan rasionalisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp.50,69 triliun (Munawir *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan adanya tuntutan efisiensi yang bersifat wajib yang di mana penghematan tidak lagi menjadi sekadar pilihan manajerial, melainkan kewajiban secara hukum yang harus diadopsi oleh seluruh tingkat pemerintahan. Regulasi ini menginstruksikan secara spesifik mengenai pengurangan belanja perjalanan dinas minimal 50 persen serta pembatasan pada honorarium tim dan kegiatan seremonial memberikan tantangan operasional yang nyata (Budiman *et al.*, 2025). Menurut Martarech *et al.*, (2025) kebijakan ini merupakan bentuk intervensi negara untuk mengalihkan ruang fiskal demi mendukung prioritas baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo. Namun, pemotongan menyeluruh tanpa evaluasi berbasis kinerja yang mendalam berisiko mengganggu stabilitas operasional di level pemerintah bawah.

Tekanan fiskal di tingkat pusat ini secara otomatis menciptakan ketidakstabilan yang relevan pada stabilitas keuangan di tingkat regional, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur telah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyesuaikan postur anggaran karena adanya pengurangan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai hampir Rp200 miliar (Kominfo

Jatim, 2025). Kondisi ini sangat krusial mengingat data menunjukkan bahwa 88 persen daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat yang menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari total pendapatan daerah mereka (Munawir *et al.*, 2025). Ketergantungan yang tinggi ini menjadikan daerah berada dalam posisi sangat rentan ketika pemerintah pusat melakukan rasionalisasi transfer secara mendadak. Pemerintah daerah dipaksa melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi celah fiskal tersebut agar pelayanan publik primer tidak terhenti.

Dinamika ini berdampak nyata pada sektor pelayanan dasar di Kabupaten Jember, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur. Data empiris menunjukkan bahwa 90 persen pengelola keuangan sekolah di Jember merasa terdampak langsung oleh efisiensi anggaran ini, khususnya pada realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), pembatasan pada kode rekening belanja perjalanan dinas dan jasa tenaga pendidikan telah menghambat program pengembangan kompetensi guru serta kegiatan operasional sekolah lainnya (Hayati *et al.*, 2025). Di tingkat korporasi daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember sebagai koordinator fiskal daerah kini menghadapi dilema untuk memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematuhi batasan 50 persen pemotongan operasional tanpa menurunkan target kinerja pelayanan publik dasar.

Upaya dalam penelitian ini membedakan pada eksplorasi terhadap bentuk-bentuk inovasi proses dan tata kelola digital yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jember sebagai mekanisme pertahanan fiskal. Implikasi *dashboard monitoring* realisasi belanja secara *real time* serta fitur *tagging* belanja yang ketat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menunjukkan adanya pergeseran paradigma birokrasi menuju sistem yang lebih transparan (Wahyu & Wanusmawatie, 2025). Selain inovasi teknologi, terjadi transformasi peran BPKAD menjadi konsultan fiskal interaktif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memandu efisiensi tanpa menurunkan target kinerja pelayanan publik, dan adanya perubahan pola komunikasi dan optimalisasi instrumen digital ini

adalah kunci utama yang menjaga stabilitas daerah di bawah anggaran yang terbatas.

Keperluan dalam penelitian ini sangat mendasar untuk memastikan bahwa hak konstitusional warga negara atas pendidikan dan kesehatan tidak terabaikan di tengah kebijakan penghematan. Status hukum Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang sering dianggap sebagai "norma buatan" karena kedudukannya di luar hierarki peraturan perundang-undangan menciptakan tantangan legitimasi yang serius ketika diterapkan sebagai dasar pemangkasan anggaran sektor vital (Ihsan, 2025). Penelitian ini dapat mengisi kekosongan data dengan memberikan analisis berdasarkan bukti terhadap strategi manajerial dan sinkronisasi sistem digital yang digunakan oleh instansi pengelola keuangan tingkat kabupaten dalam merespons kebijakan konsolidasi fiskal yang bersifat struktural. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Anggaran Daerah Pasca Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan penganggaran daerah sebelum dan sesudah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana strategi adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jember dalam proses penganggaran daerah pasca Inpres Nomor 1 Tahun 2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perbedaan struktur dan mekanisme penganggaran di BPKAD Kabupaten Jember antara periode sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan efisiensi nasional Inpres Nomor 1 Tahun 2025

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi adaptasi manajerial serta inovasi teknologi yang diterapkan BPKAD Kabupaten Jember guna menjaga stabilitas fiskal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dalam mengidentifikasi mengenai perubahan fiskal di tingkat lokal serta memperkaya kemampuan analisis kritis dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Instansi

Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengoptimalkan strategi penganggaran serta memperkuat integritas sistem digital pengelolaan keuangan.

3. Bagi Pembaca

Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan birokrasi daerah dalam menghadapi efisiensi fiskal dan temuan kualitatif ini dapat dikembangkan menjadi landasan penelitian kuantitatif.